

EXECUTIVE SUMMARY

--

MAKNA AGAMA BAGI BIROKRAT

(Relasi Religiusitas dan Etos Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)



Oleh:

SAOKI

NIP: 197404042007102005

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2013

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbagai negara bangsa di berbagai belahan dunia, birokrasi merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa. Birokrasi bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan¹ publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan secara operasional, efektif, dan efisien. Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) dalam keseluruhan skenario perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).²

Menelaah dunia birokrasi sedikit mengingatkan kita tentang novel *The Godfather* karya Mario Puzo. Novel yang sempat difilmkan ini menceritakan kisah keluarga Mafia yang dipimpin oleh Don Vito Corleone, mafia yang menguasai jaringan bisnis ilegal di New York. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Mafia Sisilia yang disegani. Corleone dikenal sebagai seorang pria yang logis, adil dan murah hati. Ia kerap didatangi siapa saja untuk dimintai bantuan. Ia tidak pernah memberikan janji kosong. Hal ini menyebabkan dirinya digelar “Don” yang terhormat, dan panggilan lainnya yang lebih penuh kasih, “Godfather”. Namun, ia menunjukkan paradoks yang luar biasa. Selain suka menolong, mencintai keluarga dan para sahabatnya, ia juga dikenal sebagai seorang yang bengis, kejam, dan melakukan bisnis haram. Selain itu, ia juga menunjukkan ekspresi ketakwaan, dengan rajin mendatangi gereja dan berkomunikasi dengan pastur. Sisi kebaikan yang bertaut dengan kebaikan inilah yang mengingatkan kita pada konteks birokrasi di Indonesia. Ada wajah penuh kasih tatkala melihat betapa sektor ini menampilkan sisi keberagaman yang mulai berkembang pesat, namun terdapat sisi gelap tatkala melihat kecurangan dan penyelewengan yang mengurita di wilayah birokrasi. Agama, jika melihat apa

¹ Dadi J. Iskandar, *Birokrasi Indonesia Kontemporer: Kinerja Birokrasi Otonomi Daerah, Good Governance Civil Society Demokratisasi* (Bandung: ALQAprint, 2006), 16.

² Ali Anwar Yusuf & Usin S. Artayasa, *Implementasi Kesalehan Sosial dalam Perspektif Sosiologi dan al-Quran* (Bandung: Humaniora, 2007), 59.

Tingkatan keberagamaan birokrat pada akhirnya diukur dengan identifikasi-identifikasi formal yang konvensional. Sakral karena diakui, bukan karena dialami. Sesuatu dianggap sakral bukan karena telah terjadinya kesatuan spiritual (*spiritual unity*) antara sesuatu tersebut dengan seorang individu, melainkan karena secara konvensional sesuatu itu merupakan sesuatu yang sakral. Kedalaman emosi individual berubah menjadi emosi masa atau sosial.

Untuk itulah, dalam penelitian ini, penulis berusaha mengetengahkan makna agama bagi birokrat, lalu menganalisis relasinya dengan peningkatan etos kerja birokrat. Dengan melakukan penelitian ini, kita bisa menganalisis lebih jauh tentang pengaruh religiusitas pada etos kerja di lingkungan birokrat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- ### C. Kajian Teoritik

Dalam teori fungsionalnya, Malinowski menemukan adanya hubungan dialektis antara agama dan fungsinya. Fungsi ini bisa dilihat dari ritual-ritual

Pemaknaan terhadap simbol-simbol keagamaan itu bergantung pada kualitas ibadah dan pengabdian, serta keadaan internal manusia. Sebuah ritual bisa ditujukan untuk meraih keridhoan Tuhan, dan memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Teori fungsional melihat fungsi ritual agama dalam konteks yang lebih luas, baik dalam konteks spiritual, maupun eksistensi kemanusiaan. Ia bisa dipahami sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan mengapa ritual itu ada atau diadakan. Dalam konteks sosiologis, sebuah ritual merupakan sebuah manifestasi dari apa yang disebut oleh Durkheim sebagai alat memperkuat solidaritas mekanis melalui pelaksanaan ritual dan pengabdian.⁵

³ Irwan Abdullah dkk (ed), *Dialektika Teks Suci Agama; Strukturasi Makna Agama Dalam Kehidupan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

⁴ Abdurrahman Wahid, “Menafsirkan Kembali Ajaran Agama: Dua kasus dari Jombang” dalam Muh. Saleh Isre (ed), *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 71.

⁶ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York: Oxford University Press, 1996), 11-13.

1. Agama disebut sebagai sistem sosial. Ini hendak menjelaskan bahwa agama adalah sebuah fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan, suatu sistem sosial dapat dianalisis, karena terdiri atas suatu kompleks kaidah dan peraturan yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan kepada tujuan tertentu.
2. Agama berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris. Ungkapan ini mau mengatakan agama itu khas berurusan dengan kekuatan-kekuatan dari “luar” yang “dihuni” oleh kekuatan –kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan masuia dan yang dapat dipercayai sebagai arwah, roh-roh dan roh tertinggi.
3. Manusia mendayagunakan kekuatan-kekuatan di atas untuk *kepentingannya sendiri dan masyarakat sekitarnya*. Yang dimaksud dengan keselamatan (kepentingan) ialah keselamatan di dunia sekarang ini dan keselamatan di “dunia lain” yang dimasuki manusia setelah kematian.⁷

Dalam konteks antropologis-sosiologis, agama sebagai sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian dari inti dan sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.⁸

Durkheim yang melihat agama dalam perspektif sosiologis, mengartikan agama sebagai sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan sesuatu yang suci. Agama mempersatukan para pemeluknya menjadi satu komunitas moral yang tunggal. Ada satu kepercayaan bahwa agama sebagai suatu

34. ⁷ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia, 1983),

⁸ Rouland Robertson (ed), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Surabaya: Rajawali Pers, 1992), vii.

Menurut Durkheim, dasar landasan kehidupan keagamaan dan agama adalah dari dan di dalam kehidupan sosial itu sendiri.¹¹ Agama mempunyai peran ganda, untuk individu dan masyarakat. Terhadap seorang individu, agama adalah jalan penyucian diri, sarana penyucian jiwa yang akan memberi pegangan dan pedoman untuk mencapai kesempurnaan hidup. Terhadap suatu masyarakat, agama menjadi salah satu sarana penting dalam tertib sosial dan norma-normanya sering amat efektif untuk membentuk suatu sistem sosial.¹²

Fakta adanya penyimpangan dan pemanfaatan ajaran agama untuk tujuan praktis merupakan sebuah kondisi adanya tingkat keagamaan magis pada sistem tribal yang memanipulasi Tuhan bagi kepentingan sepihak. Pada fase ini, kegiatan ibadah hanya berdasarkan pada ritus artifisial yang tak memiliki konteks pada kehidupan sosial.

⁹ Wahyudi, *Islamologi Terapan* (Surabaya Gitamedia Press, 1997), 16.
¹⁰ Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kencana, 2004), 107.
¹¹ R. B. Riyo Mursanto, Realitas Sosial Agama menurut Peter L. Berger, dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Gramedia, 1993), 223.
¹² Soejatmoko, *Etika Pembebasan* (Jakarta: LP3ES, 1988), vii.
¹³ Brian Morris, *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer* (Yogyakarta: AK group, 2007), 130.

¹³ Brian Morris, *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer* (Yogyakarta: Group, 2007), 130.

Tatkala agama menjadi legimitasi bagi penindasan dan terror, itu hanya karena alasan perbedaan dalam mengekspresikan pemahaman keagamaannya. Hal ini seperti diungkan Frithjof Schuon, bahwa pada tataran ekstrinsiklah manusia beragama saling berbeda dan saling sikut, bukan pada tataran intrinsik, dapat digambarkan sebagai berikut :

Dimensi Individual

¹⁴ Cuzzort & King & Mulyadi Guntur Waseso, *Kekuasaan, Birokrasi, Harta dan Agama di Mata Max Weber & Emile Durkheim* (Yogyakarta: PT Hanindita, 1987), 52.

¹⁵ Fritjhof Schuon, *Islam Filsafat Perenial* (Judul asli: Islam and The Perennial Philosophy), (Mizan, Bandung, 1993), 29.

Ketika mengungkap hubungan interdependensi antara agama dan masyarakat, Wach mengungkapkan adanya pengaruh timbal balik antara kedua faktor tersebut. Pertama, pengaruh agama terhadap masyarakat, seperti yang terlihat dalam pembentukan, pengembangan dan penentuan kelompok keagamaan spesifik yang baru. Dalam hal ini, Wach memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor sosial yang memberikan nuansa dan keragaman perasaan dan sikap keagamaan yang terdapat dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial tertentu.¹⁶

C.2. Birokrasi

¹⁶ Joachim Wach, *Sociology of Religion* (Chicago: The University of Chicago, 1944), 418.
¹⁷ Muhammad Fauzi, *Agama dan Realitas Sosial: Renungan & Jalan Menuju Kebahagiaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3.
¹⁸ HG. Fredericsen, *Administrasi Negara Baru* (Jakarta: LP3ES, 1980), 48.

Weber melihat birokrasi dalam kerangka teori tentang kekuatan, yaitu teori sehubungan dengan hubungan kekuatan di antara pejabat-pejabat dalam sesuatu birokrasi dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh birokrasi dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi serta bisnis dalam wilayah administrasi yang secara legal menjadi kewenangan administratifnya.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa model birokrasi modern yang dikemukakannya adalah sebuah tipe ideal yang dibedakan dari model birokrasi yang berkembang dalam masyarakat dan pemerintahan tradisional yang coraknya patrimonial, yang sarat dengan hubungan-hubungan personal dan kekerabatan, pendiskriminasian pelayanan berdasarkan atas suka atau tidak suka terhadap yang dilayani dan atas penggolongan social yang berlaku dalam masyarakatnya. Weber menyatakan bahwa model birokrasi rasional yang impersonal dan sesuai ketentuan hukum adalah responsif terhadap perkembangan

[illegible]

Lebih jelasnya, birokrasi, menurut Max Weber pertama, berbagai aktivitas regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi; kedua, organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan kantor yang lebih tinggi; ketiga, operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik, dan; keempat, pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas formalistik tanpa kebancian atau kegairahan, dan kerenanya tanpa antusiasme atau afeksi.

Karakteristik birokrasi tipe ideal sebagaimana dimaksud Weber di atas adalah meliputi :

1. Adanya pembagian kerja yang jelas;
2. Adanya hierarki jabatan;
3. Adanya pengaturan sistem yang konsisten;
4. Prinsip *formalistic impersonality*;
5. Penempatan berdasarkan karier;

Metodologi Penelitian

D.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yakni pengungkapan realitas tanpa melakukan pengukuran yang baku dan pasti. Peneliti berusaha menggambarkan fenomena sosial secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Karena itu, kriteria kualitas lebih ditekankan pada relevansi, yakni signifikansi dan kepekaan individu terhadap lingkungan sebagaimana adanya. Sebaliknya paradigma ilmiah lebih ditekankan pada validitas internal dan eksternal, reliabilitas instrumen dan obyektifitas yang bersifat kuantitatif.

Penelitian kualitatif, karena menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif (*a priori*) melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Rangkaian fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan, ditafsirkan, dan disajikan dapat menghasilkan teori. Karena itu, penelitian kualitatif tidak bertolak dari teori, tetapi menghasilkan teori, yang disebut *grounded theory* (teori dari dasar). Sebaliknya penelitian kuantitatif sering bertolak dari teori, sehingga bersifat reduksionis dan verifikatif, yakni hanya membuktikan teori (menerima atau menolak teori).

D.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif, karena menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif (*a priori*) melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Rangkaian fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan, ditafsirkan, dan disajikan dapat menghasilkan teori. Karena itu, penelitian kualitatif tidak bertolak dari teori, tetapi menghasilkan teori, yang disebut *grounded theory* (teori dari dasar). Sebaliknya penelitian kuantitatif sering bertolak dari teori, sehingga bersifat reduksionis dan verifikatif, yakni hanya membuktikan teori (menerima atau menolak teori).

²¹ David Ray Griffin, *Tuhan & Agama dalam Dunia Postmodern* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 95-96.

D.2. Alasan Pemilihan

Di samping itu, lingkungan birokrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika keberagamaan yang cukup ekspresif semenjak digulirkannya kegiatan-kegiatan rutin bercorak keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya euforia yang cukup bagus dalam aspek religius, meskipun belum tentu menunjukkan pengaruh signifikan pada pola kerja birokratis di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

[illegible]

Merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.²⁴ Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan, yang selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan.

Partisipatoris (*Every day live*). Secara langsung peneliti melibatkan diri dalam aktivitas keseharian para informan.

Dalam menganalisis data, sesuai dengan metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan empat kerangka teori, yaitu :

Dalam perspektif ini, sesuai dengan perspektif konstruksi sosial, pembentukan identitas sebagai suatu fenomena sosial dapat difahami dengan melihatnya dalam konteks dua realitas sosial. **Pertama**, realitas ‘authority-defined” yaitu realitas yang didefinisikan oleh pihak yang berada dalam struktur kekuasaan yang dominan. **Kedua** realitas sosial “everyday-defined”, yaitu realitas yang dialami sendiri oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua realitas sosial tersebut wujud secara bersamaan pada sembarang waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kedua

[illegible]

realitas tersebut saling berkaitan dan secara berterusan saling mempengaruhi. Oleh yang demikian, keduanya mungkin mempunyai persamaan atau sebaliknya. Hal ini karena realitas sosial “everyday-defined” adalah sesuatu pengalaman yang dialami, sedangkan realitas sosial “authority-defined” adalah hasil daripada pengamatan dan interpretasi. Oleh yang demikian, identitas yang dimiliki oleh seseorang mungkin bersifat ganda; di satu sisi adalah berasal dari apa yang dinyatakan oleh ‘authority-defined’, dan di sisi lain melalui pengalaman hariannya atau “everyday-defined”.

2. Fenomenologi

Istilah 'fenomenologi' sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Fenomenologi diartikan sebagai:

- 1) Pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang Menurut Moleong,²⁵ peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti *peristiwa* dan *kaitan-kaitannya* terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis memulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti.

Hal ini berangkat dari arti asal kata fenomenologis yaitu 'fenomena' atau gejala alamiah. Jadi para fenomenolog berusaha memahami fenomena-fenomena yang melingkupi subyek yang diamatinya. Sehingga yang ditekankan adalah aspek subyektif dari perilaku orang. Para fenomenolog berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka

²⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 47.

Jika fenomenologi fokus pada pemahaman terhadap pengalaman subyektif atas suatu peristiwa, maka interaksi simbolik fokus pada **penafsiran** terhadap pemaknaan subyektif yang muncul dari hasil interaksi dengan orang lain atau lingkungannya.

Jadi, perbedaan mendasar antara fenomenologi dan interaksi simbolik muncul dari makna katanya sendiri: fenomena dan interaksi. Fenomenologi bertumpu pada *pemahaman* terhadap pengalaman subyektif atas gejala alamiah (**fenomena**) atau peristiwa dan kaitan-kaitannya, sedangkan interaksi simbolik bertumpu pada *penafsiran* atas pemaknaan subyektif (simbolik) yang muncul dari hasil **interaksi**. Pada fenomenologi, ibarat fotografer, peneliti 'merekam' dunia (pengalaman, pemikiran, dan perasaan subyektif) si subyek dan mencoba memahami atau menyelaminya, sedangkan pada interaksi simbolik, peneliti menafsirkan makna-makna simbolik yang muncul dari hasil interaksi subyek dengan lingkungannya dengan cara memasuki dunianya dan menelusuri proses pemaknaan tersebut.

Dramaturgi merupakan teori yang mempelajari proses dari perilaku dan bukan hasil dari perilaku. Ini merupakan asas dasar dari penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan *scientific*.²⁶

[illegible]

Dari perspektif ini kita memahami sejauh mana urgensi simbol mempengaruhi seluruh konsep dasar dan cara kerja perspektif ini. Oleh karena itu, definisi tentang simbol perlu untuk kita kaji lebih jauh. Simbol dalam perspektif ini didefinisikan sebagai objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan apapun yang disepakati untuk direpresentasikan.²⁷

Definisi tentang simbol seperti ini membawa kita pada tiga premis dasar dalam perspektif interaksionisme simbolik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Blumer, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki oleh sesuatu tersebut bagi mereka; (2) makna dari sesuatu tersebut muncul dari interaksi sosial seseorang dengan yang lainnya; dan (3) makna tersebut disempurnakan melalui sebuah proses interpretasi pada saat seseorang berhubungan dengan sesuatu tersebut.²⁸ Dari ketiga premis yang dilontarkan oleh Blumer ini, bisa kita simpulkan bahwa kedudukan makna simbol sangatlah urgen, sebab ia menjadi dasar bagi manusia untuk melakukan suatu tindakan. Di samping itu, hal ini juga mengindikasikan begitu pentingnya ketiga istilah kunci lainnya dalam memahami perspektif interaksionisme simbolik.²⁹

²⁹ Goerge Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2008), 289.

Sebagaimana judul penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa birokrat yang menjadi bagian dari lingkungan Pemprov Jatim. Mereka tersebar di beberapa BKD maupun di beberapa badan di bawah naungan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Beberapa paparan data di atas mengindikasikan terjadinya sebuah fenomena sosial religious dimana agama belum mampu menjadi ruh yang menggerakkan kebaikan. Hal ini tampak sebagaimana penilaian Gordon W. Allport, seorang psikolog, yang membagi dua macam cara beragama: ekstrinsik dan intrinsik. Beragama secara ekstrinsik berarti memandang agama sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Agama dimanfaatkan demikian rupa untuk memperoleh status. Intinya, beragama demi status dan harga diri. Ajaran agama belum menghujam ke dalam dirinya. Keberagamaan seperti ini, adalah cara beragama yang tidak tulus, yang akan melahirkan egoisme. Cara beragama yang ekstrinsik menjadikan agama sebagai alat politis dan ekonomis. Sebuah sikap beragama yang memunculkan sikap hipokrit; kemunafikan. Pendapat demikian justru diungkapkan oleh beberapa narasumber yang melakukan otokritik terhadap birokrasi dan polarisasi yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Dalam penelitian ini, etos kerja dimaknai sebagai nilai-nilai yang diyakini sebagai cita-cita ideal tentang kerja, yang diwujudkan dalam kebiasaan kerja sehari-hari. Sedangkan semangat kerja merupakan refleksi dari etos kerja yang didalamnya terkandung gairah kerja yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerjanya sesempurna mungkin. Etos kerja tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Etos kerja dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai (agama dan kepercayaan) yang diyakininya. Dalam etos kerja terkandung gairah atau semangat kerja yang amat

Penjelasan di atas tampaknya sesuai dengan rasionalisasi birokrasi yang jauh-jauh hari dikemukakan oleh Weber. Ia menyebutkan bahwa bekerja yang baik harus bersumber pada ajaran yang menekankan pada sifat kerja keras, rajin

Dengan demikian, esensi dari etos kerja birokrasi merupakan perilaku kerja positif dalam birokrasi yang timbul sebagai refleksi dari keyakinan tentang nilai baik dan benar dalam kinerja birokrasi. Atau sebagai konsep dan paradigma tentang makna kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang dalam birokrasi sebagai baik dan benar yang diwujudkan secara khas dalam perilaku kerja mereka sehari-hari.

Bagi birokrat yang menganggap bahwa agama memiliki keterkaitan erat dengan disiplin kerja dan kualitas kinerja, maka ia akan menjadi pemeluk agama yang baik dan bekerja berdasarkan cita-cita keagamaan yang ia yakini. Adapun bagi birokrat yang bekerja atas dasar mentaati mekanisme peraturan yang berlaku—tanpa harus melibatkan pertimbangan keagamaan di dalamnya—ia cenderung berpikiran spekulatif dengan pertimbangan keuntungan bersifat sosial ekonomis. Sedangkan birokrat yang menganggap bahwa agama sebatas symbol-simbol yang dilibatkan dalam fruang publik, dan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kualitas kerja, cenderung menganggap kinerja mereka harus berlandaskan profesionalisme dan integritas, bukan berdasarkan nilai agama tertentu. Di sisi lain, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi kerja tertentu di lingkungan birokrasi ternyata sulit membedakan pegawai yang beretos kerja tinggi dan pegawai yang beretos kerja rendah. Bagi birokrat agama memainkan peranan signifikan dalam peningkatan etos kerja, namun bagi sebagian yang lain agama tidak memiliki peranan dalam peningkatan kualitas kerja. Bagi kelompok terakhir ini, peningkatan etos kerja bisa didapat dari

